

Pengaruh tingkat partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan melalui program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP): Studi kasus di Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan

Happy Agustiani ^{a,1,*}

^aInstitut Studi Islam Muhammadiyah Pacitan, Jl. Gajah Mada No. 20 Baleharjo, Pacitan 63511, Indonesia

¹ happyagustiani96@gmail.com*

* corresponding author

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel

Diterima: 10 Mei 2023

Direvisi: 1 September 2023

Diterbitkan: 30 September 2023

Kata Kunci

Partisipasi masyarakat

Pembangunan

Kecamatan Pringkuku

ABSTRAK

Peran aktif pemerintah dalam menyikapi fenomena kemiskinan sangatlah strategis dengan menempuh kebijakan yang dapat melahirkan program/kegiatan pembangunan secara terpadu. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui peran masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan melalui program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan di wilayah Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan program PNPM-MP. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-PM) di Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan berjalan sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang sudah ditetapkan. Selain itu keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kegiatan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan desa cukup memadai.

This is an open access article under the CC-BY-SA license.



Sitasi Jurnal: Agustiani, H. (2023). Pengaruh tingkat partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan melalui program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP): Studi kasus di Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan. *Jurnal Komunikasi Sosial Budaya*, 1(2), 45-50

1. Pendahuluan

Masalah kemiskinan dewasa ini bukan saja menjadi persoalan bangsa Indonesia. Kemiskinan telah menjadi isu global dimana setiap negara merasa berkepentingan untuk membahas kemiskinan, terlepas apakah itu negara berkembang maupun sedang berkembang. Tokoh yang dianggap bapak ilmu ekonomi modern, Adam Smith (1776) menyebut bahwa, “tidak ada masyarakat yang benar-benar bisa berkembang dan senang apabila kebanyakan diantaranya miskin dan tidak bahagia.” begitu juga tokoh ekonomi bahwa kemiskinan dan kesenjangan merupakan permasalahan utama pembangunan. Tokoh sosial Juan Somavia (1995) menyatakan bahwa persoalan yang tidak akan pernah selesai di abad 21 ini adalah bagaimana mengurangi kemiskinan.

Salah satu upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa yakni terciptanya kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur dan pencapaian cita-cita tersebut dilaksanakan secara sistematis dan terpadu dalam bentuk operasional penyelenggaraan pemerintahan. Selaras dengan fenomena dan dinamika yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan kesenjangan yang tinggi antara kebutuhan dengan kemampuan manusia dan besarnya tuntutan hidup yang dihadapi. Hal ini terkadang tidak

sesuai dengan kemampuan manusia itu sendiri, mengakibatkan manusia tidak berdaya yang akhirnya menjadi penyebab utama dari kemiskinan.

Peran aktif pemerintah dalam menyikapi fenomena kemiskinan sangatlah strategis dengan menempuh kebijakan yang dapat melahirkan program/kegiatan pembangunan secara terpadu, termasuk upaya peningkatan peran pemerintah yang lebih mampu menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan merubah pola pikir serta sikap mental mereka. Upaya terpadu diharapkan dapat mengikutsertakan masyarakat dalam kehidupannya serta membantu dan memberdayakan mereka dalam berbagai kegiatan produktif yang sesuai dengan potensi masing-masing masyarakat, sehingga jangan hanya dijadikan sebagai sebuah objek pembangunan, tetapi juga harus dapat menjadi subjek dari pembangunan tersebut.

Adapun masyarakat dikatakan sebagai subyek, dimana peran dan partisipasi aktif dari masyarakat dapat memaksimalkan tujuan pembangunan itu sendiri dan dapat mengarahkan pembangunan tepat sasaran serta menjadi kunci utama dari keberhasilan pembangunan. Kerjasama dan koordinasi serta sinergitas dapat tercipta antara masyarakat dengan pemerintah secara baik, dengan melihat apakah masyarakat telah memiliki kemampuan berperan aktif dalam sebuah proses pembangunan, karena kemampuan berperan aktif merupakan hal yang sangat mendukung keberhasilan sebuah proses pembangunan.

Sejarah pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan yakni : Program Inpres, Jaring Pengaman Sosial (JPS), dan lain sebagainya. Pada tahun 1993, Pemerintah mengeluarkan kebijakan strategis berupa Instruksi Presiden No.5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan di Pedesaan/Kelurahan tertinggal yang dikenal dengan Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Tahun 1999 dilakukan penyempurnaan melalui program yang diharapkan dapat meningkatkan bantuan pengembangan kepada masyarakat berupa bantuan langsung masyarakat melalui pengelolaan di tingkat kecamatan yang disebut dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai suatu kebijakan yang di tujukan untuk memberdayakan masyarakat miskin sebagai kelanjutan Inpres Desa Tertinggal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, memperkuat institusi lokal dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan. Secara khusus Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dirancang untuk meningkatkan keterpaduan pengembangan usaha produktif melalui pemberian modal usaha maupun pembangunan sarana/prasarana (Petunjuk Teknis PPK, 1998), dan program ini dimulai pada tahun 1998/1999 yang terdiri dari 3 fase yakni fase pertama(PPK I) tahun 1998/1999 sampai 2000, fase kedua (PPK II) tahun 2003 hingga tahun 2006, sedang fase ketiga (PPK III) dimulai tahun 2006.

Penyempurnaan program terus dilakukan oleh Pemerintah dan padatangal 01 September 2006, Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dirubah menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dan terakhir pada tanggal 30 April 2007 disempurnakan menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) yang mengadopsi mekanisme dan skema PPK, PNPM Mandiri terdiri dari PNPM Pedesaan untuk masyarakat Daerah Kabupaten, PNPM Mandiri Perkotaan untuk Daerah Tertinggal dan Khusus, PNPM Mandiri Infrastruktur Pedesaan, dan PNPM Mandiri Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah.

Program PNPM-MP yang dirancang sebagai bagian dari proses percepatan penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat, dengan memberikan modal usaha untuk pengembangan usaha ekonomi produktif dan pembangunan prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan ekonomi pedesaan. Program ini juga dirancang sebagai proses pembelajaran (learning) bagi masyarakat dan aparat melalui proses kegiatan pengambilan keputusan yang demokratis, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan.

Bentuk-bentuk kegiatan dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Laguboti adalah pembangunan fisik sarana dan prasarana, Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang penyaluran dana yang diberikan kepada kelompok masyarakat di desa. Bentuk kegiatan dimaksud ternyata belum berpengaruh besar terhadap angka penduduk miskin di Kecamatan Laguboti yang telah menerima bantuan PNPM-MP sejak tahun 2003 dengan dana yang besar. Salah satu prinsip dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-PM) adalah partisipasi, dengan asumsi jika pengaruh partisipasi masyarakat tinggi, maka kesempatan untuk berkompetisi atau mendapatkan dana dari program ini akan besar, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan kemandirian masyarakat dan masyarakat

miskin bukan lagi sebagai objek pembangunan melainkan sebagai pelaku utama pembangunan yang dapat menyuarakan secara bersama kebutuhan mendasar yang penting untuk terpenuhi.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi kasus untuk mengungkapkan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan. Subjek penelitian ini adalah masyarakat di Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi terhadap pelaksanaan pembangunan secara langsung. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara analisis deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan melalui program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan.

3. Hasil dan Pembahasan

Partisipasi Masyarakat pada Tahap Perencanaan

Berdasarkan hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa Partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan berpengaruh terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan melalui PNPM-MP. Hal ini diindikasikan karena pada tahap perencanaan kegiatan meliputi tahap persiapan dan sosialisasi awal, serta perencanaan di desa, dan kecamatan. Tahap persiapan dan sosialisasi awal dimulai dari Masyarakat Antar Desa (MAD) Sosialisasi sampai dengan Pelatihan Kader Pembangunan Masyarakat Desa/Kota (KPM/D/K). Perencanaan kegiatan di desa, dimulai dengan tahap penggalian gagasan sampai dengan musyawarah desa perencanaan disebut dengan istilah Menggagas Masa Depan Desa (MMDD). Perencanaan kegiatan di kecamatan dimulai dengan Musyawarah Antar Desa prioritas usulan sampai dengan Musyawarah Antar Desa penetapan usulan. Musyawarah desa perencanaan merupakan pertemuan masyarakat di desa yang bertujuan untuk membahas seluruh gagasan kegiatan, hasil dari proses penggalian gagasan di kelompok-kelompok/dusun. Bahan-bahan yang disiapkan pada tahap ini adalah peta desa hasil penggabungan semua peta dusun, rekap data RTM dusun, diagram Venn kelembagaan, rekap gagasan semua dusun, rekap masalah semua dusun, dan usulan kelompok perempuan. Pada setiap musyawarah perencanaan di desa sangat kehadiran dan keterlibatan masyarakat desa untuk berperan aktif tinggi kondisi kebutuhan desa dapat dipetakan dengan baik.

Partisipasi Masyarakat pada Tahap Pelaksanaan

Berdasarkan hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa Partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan berpengaruh terhadap Pelaksanaan Kegiatan pembangunan dengan PNPM-MP. Hal ini disebabkan karena untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu pada prinsip dan mekanisme PNPM-MP, maka perlu adanya persiapan pelaksanaan yang matang dan terencana. Persiapan pelaksanaan ini lebih ditujukan kepada penyiapan aspek sumber daya manusia, termasuk masyarakat, Tenaga Pelaksana Kegiatan (TPK), Unit Pelaksana Kegiatan (UPK), dan seluruh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan lainnya. Karena itu, TPK dan UPK perlu mendapatkan pelatihan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan yang didanai PNPM Mandiri Perdesaan. Pelatihan UPK, BP-UPK, TPK, dan pelaku desa lainnya dilakukan dalam masa setelah penandatanganan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) oleh Camat, sampai dengan masa persiapan pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan adalah tahap pelaksanaan seluruh rencana yang telah disepakati dalam pertemuan MAD penetapan usulan dan musdes informasi hasil MAD serta rapat-rapat persiapan pelaksanaan.

Hal-hal yang penting diperhatikan pada pelaksanaan sesuai Petunjuk Teknis Operasional adalah sebagai berikut:

- 1) Masyarakat merupakan pemilik kegiatan, sehingga keputusan pelaksanaan dan tanggung jawab ada pada masyarakat,
- 2) Masyarakat desa mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan, terutama bagi masyarakat miskin atau anggota RTM,
- 3) Apabila ada bagian pekerjaan yang belum mampu dikerjakan oleh masyarakat sendiri, masyarakat dapat mendatangkan tenaga trampil atau ahli dari luar sepanjang disepakati dalam musyawarah desa, dan kebutuhan tersebut di atas harus diperhitungkan dalam RAB kegiatan,
- 4) Penggunaan dana sesuai dengan rencana dan kegiatan agar mencapai hasil yang memuaskan serta selesai tepat waktu.

Partisipasi Masyarakat pada Tahap Evaluasi

Berdasarkan hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa Partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan Pembangunan dengan PNPM-MP. Hal ini disebabkan karena pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan harus dijamin dapat memberi manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (sustainable). Di samping manfaat dari hasil kegiatan, aspek pemberdayaan, sistem dan proses perencanaan, aspek good governance, serta prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan harus memberi dampak perubahan positif secara berkelanjutan bagi masyarakat. Untuk dapat mencapai hal itu maka semua pelaku PNPM Mandiri Perdesaan sudah mengetahui dan mampu memahami latar belakang, dasar pemikiran, prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan secara benar. Pemantauan dan pengawasan adalah kegiatan pengumpulan informasi dan mengamati perkembangan pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk memastikan apakah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan pemantauan dan pengawasan juga untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan, melihat kinerja semua pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, serta melakukan identifikasi dan mengantisipasi timbulnya permasalahan.

Pemantauan dan pengawasan adalah proses yang terus menerus dilakukan sepanjang tahapan PNPM Mandiri Perdesaan termasuk pelatihan, sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Hasil dari kegiatan pemantauan dan pengawasan digunakan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan. Hasil pemantauan ini menjadi masukan untuk evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun dasar pembinaan kepada pelaku PNPM Mandiri Perdesaan dan masyarakat.

Evaluasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan pada saat selesainya suatu tahapan kegiatan atau pada saat berakhirnya satu fase program. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan berikut kualitasnya, termasuk di dalamnya adalah kinerja para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan. Sedangkan pada akhir program, evaluasi lebih ditujukan untuk melihat dampak program. Hasil dari pemantauan, pemeriksaan dan pengawasan dapat dijadikan dasar dalam evaluasi pelaksanaan program di desa maupun di kecamatan. Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai dasar upaya perbaikan terhadap kelemahan dan mengatasi hambatan yang terjadi.

Apabila dari hasil penilaian isi laporan dinyatakan terjadi penyimpangan dari rencana, kriteria, atau standar yang ditentukan, maka dilakukan pengecekan ke lapangan, melalui berbagai sumber yang dapat dipercaya. Sementara itu, kegiatan evaluasi juga dapat dilakukan pada saat tertentu (bisa dilakukan di pertengahan atau pada akhir tahun program atau siklus). Hasil kegiatan evaluasi yang dilakukan perlu diketahui juga oleh pelaku-pelaku di lapangan. Indikator yang dipakai dalam evaluasi adalah sebagai berikut:

Indikator sukses dirumuskan dari tujuan spesifik yang ingin dicapai dari setiap jenis kegiatan dalam PNPM Mandiri Perdesaan, misalnya tingkat partisipasi, tingkat perkembangan kelembagaan, dan jumlah prasarana sarana yang terbangun dan indikator kinerja dirumuskan dari tujuan khusus PNPM Mandiri Perdesaan, misalnya adakah peningkatan partisipasi masyarakat, adakah peningkatan kualitas kelembagaan, dan adakah peningkatan anggaran yang pro poor dari Pemerintah Daerah.

Berdasarkan deskripsi diatas, dapat kita lihat bahwa pada tahap evaluasi yang berperan aktif adalah para pelaku PNPM-MP baik dari Tingkat Kecamatan, Kabupaten fasilitator, LSM, wartawan, dan lain-lain dan hanya sebagian kecil yang merupakan partisipasi masyarakat.

Penelitian ini mendukung dengan hasil penelitian yang dicapai oleh Sulistyawaty (2007), dimana program PNPM juga berperan memberdayakan masyarakat terutama melaksanakan kegiatan Simpan Pinjam khusus pemberdayaan kalangan Perempuan.

Selain itu penelitian ini konsisten dengan hasil yang dicapai oleh Sagala (2007) dimana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) berpengaruh terhadap pengembangan Sosio-Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosirdan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Balige. Selain itu juga konsisten dengan hasil yang dicapai oleh Irma Purnamasari (2008), Arif (2008), Suaunya (2011) dan Yulianti (2012).

4. Kesimpulan

Secara simultan variabel partisipasi masyarakat dalam perencanaan, partisipasi Masyarakat dalam implementasi kegiatan dan partisipasi masyarakat dalam evaluasi kegiatan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan pada program PNPM-MP. Secara parsial variabel partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan partisipasi masyarakat dalam implementasi kegiatan berpengaruh berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan pada program PNPM-MP. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam evaluasi kegiatan berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan pada program PNPM-MP.

Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-PM) di Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan berjalan sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang sudah ditetapkan. Selain itu keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kegiatan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan desa cukup memadai.

Dimasa yang akan datang tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, dan implementasi dapat ditingkatkan agar dapat mendukung program PNPM-MP di Kabupaten Toba Samosir. Dimasa yang akan datang partisipasi masyarakat dalam evaluasi kegiatan agar lebih banyak dilibatkan agar dapat mendukung sepenuhnya program pembangunan pada program PNPM-MP, dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat. Pada pelaksanaan PNPM-MP perlu evaluasi dari seluruh pelaku PNPM-MP mulai dari tingkat desa sampai pada tingkat kabupaten, sehingga besar harapan kedepan bahwa sarana dan prasarana yang telah didanai oleh PNPM-MP dapat dilestarikan dan bermanfaat bagi masyarakat. Diharapkan peran aktif masyarakat untuk mengikuti seluruh tahapan Program dan Pemerintah Desa khususnya untuk mendorong atau memotivasi masyarakat sebagai subjek pelaksanaan pembangunan tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Kristianto Wahyu, 2008. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) di Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik).
- Anonimous, 1999. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Anderson, J.E, 1979. Publik Policy-Making, New York, Praeger.
- Arnstein, 1969, Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba Samosir, 2012, Kecamatan Laguboti Dalam Angka 2012.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba Samosir, 2012, Kabupaten Pacitan Dalam Angka 2012.
- Choguill, Marisa B. Guaraldo. 2008. "A Ladder of Community Participation for Underdeveloped Countries," Habitat International.
- Chambers, Robert. 1988. Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang, Jakarta: LP3ES.
- Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2007. Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, Jakarta.
- Dwiyanto, 2004. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia dalam abad 21. Konsep dan Pendekatan Pembangunan Perkotaan di Indonesia. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, URDI-YSS-Jakarta.
- Dwidjowijoto, 2000. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Humaniora Utama Press. Bandung.
- Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Guijt, Irene, 2000, Methodological Issues in Participation Monitoring and Evaluation, Learning From Change Issues and Experiences in Participatory Monitoring and Evaluation, Canada: ITDG Publishing.
- Fetterman, David and Wandersman, Abraham, 2007, Empowerment Evaluation: Yesterday, Today, and Tomorrow, American Journal of Evaluation.
- Mappadantji, 2005. Kemandirian Lokal. Konsepsi Pembangunan, Organisasi dan pendidikan dari persepsi sains baru, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Marwoto, 2005. Evaluasi Atas Kebijakan Program Beras Bagi Keluarga Miskin Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Gunungkidul, Universitas Gadjah Mada.
- Midgley dalam Moeljarto, 1995. Politik Pembangunan Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Miraza, B.H. 2005. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. ISEI, Bandung.
- Mubyarto. 1997. Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Santoso, 2004. Mengolah Data Statistik Secara Profesional, SPSS versi 12. PT Gramedia, Jakarta.
- Sandy, I. Made. 1982. Pembangunan Wilayah. Mimeograf. Bogor.
- Sagala, Otto. 2007. Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) terhadap Pengembangan Sosio-Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir.
- Suadnya, I Wayan. 2011. Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Lombok Barat: Antara Konsep dan Realita. Jurnal Agroteksos Vol. 21 No.1, April 2011.
- Soemardjan S. dkk, 1994. Kemiskinan Struktural, PT. Sanghala Pulsar, Jakarta.
- Soekartawi. 1994. Perencanaan Pembangunan. Penerbit Rajawali Press. Jakarta.
- Suharto. 2005. Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar Pada Masyarakat, Surabaya.
- Sugiyono 2002. Metode Penelitian Administrasi. CV Alfabeta. Bandung.
- Sulistiyawaty, Endang 2011. Analisis Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kabupaten Asahan.